

PERAN PERUSAHAAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

Yerik Afrianto Singgalen^{1*}

¹Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Indonesia

*e-mail: yerik.afrianto@atmajaya.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan di bidang ekonomi dapat mendukung keberlanjutan penghidupan komunitas. Secara kelembagaan, program pemberdayaan masyarakat dapat diakomodir oleh sektor publik maupun swasta dengan target luaran yang beragam. Dalam Perkembangan kajian akademik, riset tentang kontribusi perusahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan adanya ceruk yang perlu dikaji secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kontekstual, kontribusi perusahaan sosial dalam pemberdayaan komunitas dalam perspektif penghidupan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif interpretatif melalui studi kasus program pemberdayaan komunitas perusahaan sosial. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, studi dokumen dan FGD. Adapun, teknik triangulasi digunakan untuk memperoleh informasi yang valid dan kredibel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi utama perusahaan sosial bagi komunitas ialah mobilisasi akses terhadap sumber daya dalam bentuk modal manusia, modal finansial, modal sosial, modal fisik, modal alam untuk mereduksi pelbagai konteks kerentanan seperti kemiskinan, termasuk keterbatasan lain seperti penyandang disabilitas dan status narapidana. Dengan demikian, diperlukan sinergitas antara perusahaan sosial dan pemerintah untuk bersama mewujudkan penghidupan komunitas yang berkelanjutan.

Kata kunci: Perusahaan Sosial; Pemberdayaan Komunitas; Penghidupan Berkelanjutan

Abstract

Empowerment in the economic field can support the sustainability of community livelihoods. The public and private sectors can accommodate community empowerment programs with various output targets. In the development of academic studies, research on the contribution of social enterprises to community empowerment shows a niche that needs to be studied comprehensively. This study aims to describe the contribution of social enterprises contribution to community empowerment through a sustainable livelihood perspective. The research method used is interpretive qualitative through case studies of social enterprise community empowerment programs. Data collection techniques used in-depth interviews, document studies, and FGD. Meanwhile, the triangulation technique is used to obtain valid and credible information. This study showed that social enterprises mobilized the community's access to human capital, financial capital, social capital, physical capital, and natural capital. Thus, the community can resist the vulnerability context such as poverty, including other limitations such as persons with disabilities and prison status. Thus, there is a need for synergic between social enterprises and the government to achieve sustainable community livelihoods.

Keywords: Social Enterprise; Community Empowerment; Sustainable Livelihood

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



PENDAHULUAN

Perusahaan sosial memiliki karakteristik nilai, model bisnis, dan norma kelembagaan yang berbeda dengan perusahaan dengan orientasi profit pada umumnya (Davies et al., 2019). Levander (2010) berpendapat bahwa perusahaan social merupakan fenomena inovatif yang dikonstruksi untuk memperoleh legitimasi dan identitas baru dalam menghadapi isu-isu kesejahteraan yang dialami kaum marginal. Crawford-Spencer & Cantatore (2016) menunjukkan bahwa struktur perusahaan social bersifat kontekstual dan relative di masing-masing area atau ruang lingkup operasional bisnis, namun tujuan utamanya ialah misi sosial di atas keuntungan profit. Jenner & Oprescu (2016) berpendapat bahwa tantangan dari perusahaan sosial ialah meyakinkan mitra bisnis tentang orientasi terhadap misi sosial, oleh sebab itu kepemimpinan yang mampu mengakumulasi modal sosial yakni kepercayaan, jejaring dan norma, akan mempertahankan keberlanjutan perusahaan sosial tersebut.

Penggunaan istilah perusahaan sosial telah menimbulkan sejumlah perdebatan, sebagaimana Gray et al., (2003) yang mempertanyakan identitas, legitimasi, dan model bisnis perusahaan sosial dari sisi praktis dan kebijakan. Adapun, Teasdale (2010) juga mempertanyakan bagaimana pengaturan teknis operasional perusahaan dalam menghadapi kerugian yang berdampak pada keberlanjutan misi sosial. Namun, Linton (2013) menawarkan gagasan untuk mengembangkan perusahaan sosial sebagai pekerja sosial yang meletakkan nilai fundamental bisnis pada upaya pemberdayaan individu, komunitas maupun masyarakat untuk mengentaskan masalah kesejahteraan yang dihadapi secara kontekstual.

Perkembangan studi tentang perusahaan sosial di berbagai negara menunjukkan dinamika yang beragam. Doherty & Kittipanya-Ngam (2021)

menunjukkan bahwa sejak tahun 1970 telah ada inisiasi pendirian perusahaan sosial di Thailand, yang didukung oleh kebijakan dengan menggabungkan konsep ekonomi dan sosial. Selain itu, Scarlato (2012) menunjukkan bahwa dalam konteks Italia, eksistensi perusahaan sosial dipandang sebagai konvergensi dimensi ekonomi dan sosial yang patut didukung secara kebijakan untuk mengoptimalkan system kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi, terutama meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun, Mohiuddin (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan sosial berbasis nilai Islam di Bangladesh membutuhkan regulasi yang berbeda yang mendukung kelembagaan puncak untuk memanfaatkan modal sosial dan melakukan inovasi produk dan layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan sosial di berbagai negara bersifat kontekstual. Mdee et al., (2008) menekankan bahwa tatakelola, dampak dan alat ukur keberhasilan dari perusahaan sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan profit. Disisi lain, Choi & Park (2021) berpendapat bahwa pemerintah memiliki peran yang penting sebagai katalisator pertumbuhan perusahaan sosial di berbagai negara melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan perusahaan sosial tidak terlepas dari kewirausahaan sosial yang telah terbentuk di era paska colonial dimana tingkat pemberdayaan yang dirasakan oleh kelompok pribumi, identitas usaha sosial islami dan aktivisme sosial menjadi bagian dari dinamika pertumbuhan perusahaan sosial (Idris & Hijrah Hati, 2013). Dinamika pertumbuhan perusahaan sosial di Indonesia juga menunjukkan adanya paradoks dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi dengan tujuan sosial yang menunjukkan adanya kompleksitas kognitif pimpinan organisasi karena desakan atau kondisi eksternal di lingkungan masing-masing (Puspadewi et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas dan

aksesibilitas perusahaan sosial di Indonesia dalam mencapai tujuan dari misi sosial, memiliki tantangan yang beragam dan kontekstual. Keterbatasan kajian tentang perusahaan sosial di Indonesia, menunjukkan adanya ceruk atau kesenjangan sehingga perlu dilengkapi melalui penelitian yang secara komprehensif dan kontekstual menunjukkan peran perusahaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat untuk penghidupan berkelanjutan.

Pemberdayaan komunitas di bidang ekonomi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengentaskan persoalan kemiskinan. Pemberdayaan komunitas memiliki manfaat yang lebih luas seperti halnya mengatasi kesenjangan sosial serta meningkatkan kesadaran pentingnya keberlanjutan lingkungan. Secara kelembagaan, pemerintah bukanlah satu-satunya aktor yang berperan secara tunggal dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Sektor swasta melalui perusahaan sosial juga memiliki andil yang sama dalam mewujudkan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan (Margiono et al., 2019). Meskipun demikian, studi mengenai kontribusi perusahaan sosial bagi keberlanjutan penghidupan komunitas di Indonesia, masih sangat terbatas. Salah satu tantangan kajian mengenai kontribusi perusahaan sosial melalui pemberdayaan komunitas di Indonesia ialah keragaman budaya, suku dan agama yang membutuhkan kajian komprehensif serta kontekstual. Penelitian ini menawarkan gagasan untuk menguraikan secara mendalam dinamika perusahaan sosial dalam mengimplementasikan program pemberdayaan komunitas melalui perspektif penghidupan berkelanjutan yang direkonstruksi oleh Department for International Development (DFID) khususnya di negara-negara berkembang, dalam hal ini Indonesia.

Pemberdayaan komunitas di Indonesia perlu dipandang kontekstual

karena karakteristik aktor yang beragam. Para pemangku kepentingan yang ada di masing-masing daerah memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda, sehingga kapasitas untuk menyelenggarakan program pengabdian masyarakat perlu diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan input, proses dan luaran program yang relevan dengan misi serta visi lembaga (Fifiyanti & Damanik, 2021). Sofian *et al.* (2021) menunjukkan bahwa dinamika kehidupan ekonomi petani di Indonesia menunjukkan adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya yang berbeda-beda. Demikian halnya, karakteristik lembaga yang berperan penting dalam memobilisir akses petani terhadap berbagai macam modal (modal sosial, modal finansial, modal manusia, modal fisik, dan modal alam) juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sementara itu, perspektif penghidupan berkelanjutan memiliki kerangka konseptual yang mampu memetakan dimensi konteks kerentanan, akses terhadap sumberdaya, serta struktur dan proses yang berhubungan dengan mekanisme kelembagaan (Mardana, 2014). Dengan demikian perspektif penghidupan berkelanjutan dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis karakteristik perusahaan sosial dengan program pemberdayaan komunitas yang mampu mereduksi aspek kerentanan secara kontekstualitas dan komprehensif.

Kajian tentang pemberdayaan komunitas bersifat kontekstual. Suarsa dan Sutajaya (2016) membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ergo-entrepreneurship dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari hasil dang kuliner lokal. Selain itu, Mudana (2016) menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pemerintah desa berperan sebagai aktor utama dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan sumber daya

manusia, pengembangan ekonomi, pengembangan lembaga, serta pengembangan infrastruktur dan informasi. Adapun, Tegalwathi (2017) menunjukkan bahwa pemerintah dan perusahaan swasta dapat berkolaborasi untuk mengembangkan sektor ekonomi yang inklusif, melalui pemberdayaan pemasaran, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemberdayaan kelompok. Dengan demikian, program pemberdayaan menjadi terintegrasi dan tidak bersifat eksklusif pada kepentingan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai pemberdayaan masyarakat masih dominan pada jenis program dan lembaga penyelenggara dalam hal ini pemerintah. Sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan literatur, perlu dilakukan kajian secara komprehensif pada perusahaan sosial dalam perspektif penghidupan berkelanjutan yang mampu mengklasifikasi *beneficiaries*, konteks kerentanan yang dihadapi oleh *beneficiaries*, serta kapabilitas akses *beneficiaries* sebelum dan setelah dimobilisir oleh perusahaan sosial.

Perusahaan sosial dalam pelbagai program pemberdayaan masyarakat memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan profit konvensional. Hal ini menjadikan kajian tentang kontribusi perusahaan sosial dalam pemberdayaan komunitas menjadi penting untuk dikaji secara komprehensif dan kontekstual. Mekanisme koordinasi perusahaan sosial didasari oleh norma timbal balik dimana setiap individu didorong oleh motivasi pro sosial (Sacchetti et al., 2021). Lebih jauh, Gupta dan Srivastava (2021) menunjukkan bahwa dalam konteks negara berkembang, eksistensi perusahaan sosial ialah untuk menciptakan nilai sosial di tengah tantangan operasional seperti kelangkaan sumber daya. Model inovasi sosial di masing-masing perusahaan sosial memiliki perbedaan yang signifikan, namun keberadaan perusahaan sosial cenderung adaptif dengan nilai budaya hingga religiusitas komunitas lokal. Hal ini menjadi

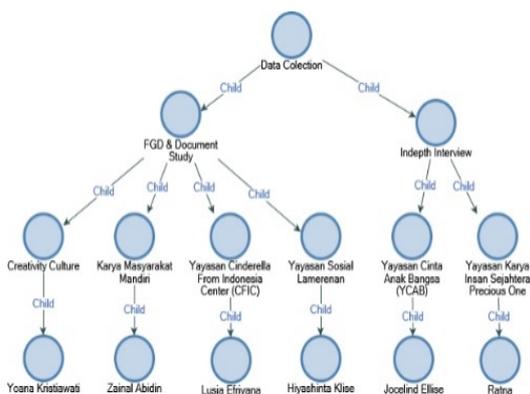
alasan pentingnya kajian komprehensif dan kontekstual pada program pemberdayaan komunitas yang diselenggarakan oleh perusahaan sosial di Indonesia. Selain kontribusi teoretis, implikasi praksis dari hasil penelitian ini ialah gambaran mengenai domain kewirausahaan sosial, konteks kerentanan, strategi koping, dan sumberdaya yang dapat dikembangkan sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi di daerah hingga pada skala nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif melalui pendekatan studi kasus (Creswell & Creswell, 2018). Proses pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi sebelum kegiatan FGD, perusahaan sosial atau venture merupakan bagian dari unit karya dari yayasan sosial. Adapun, pihak-pihak yang terlibat dalam proses FGD ialah sebagai berikut: Yayasan Karya Insan Sejahtera Precious One; Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB); Yayasan Sosial Lamerenan; Yayasan Cinderella From Indonesia Center (CIFIC); Karya Masyarakat Mandiri-Dompet Duafa; dan Creativity Culture.

Informan Kunci yang dilibatkan dalam wawancara mendalam ialah Ibu Ratna sebagai representasi dari Yayasan Karya Insan Sejahtera Precious One, Ibu Jocelind Ellise sebagai representasi dari Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB). Sementara itu, FGD diselenggarakan bersama informan dari Yayasan Sosial Lamerenan yaitu Ibu Hiyashinta Klise, Yayasan Cinderella From Indonesia Center (CIFIC) yaitu Ibu Lusya Efriyana, Karya Masyarakat Mandiri yaitu Bapak Zainal Abidin, serta Creativity Culture yaitu Ibu Yoana Kristiawati. Selanjutnya dokumen pendukung terkait dengan aktivitas masing-masing perusahaan sosial

juga dikaji secara mendalam dengan mengakses informasi terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah terpublikasi dan dapat diakses secara daring. Adapun, teknik triangulasi yakni proses pemeriksaan kesesuaian data dan informasi dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan kredibel. Secara visual, gambaran mengenai proses wawancara mendalam dan FGD dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Wawancara Mendalam dan FGD dengan Informan Kunci Perusahaan Sosial di Indonesia

Gambar 1 merupakan gambaran tentang proses pengambilan data yakni wawancara mendalam serta FGD bersama para informan kunci yang merupakan perwakilan dari perusahaan sosial di Indonesia. Instrumen yang digunakan untuk proses pengolahan data penelitian ini ialah Nvivo 12 Plus. Data hasil wawancara mendalam dan FGD dikonversi menjadi transkrip wawancara kemudian dikelola menggunakan teknik triangulasi yakni perbandingan antara hasil wawancara mendalam, FGD dan studi dokumen, untuk memperoleh informasi yang valid dan kredibel

Pengolahan data di Nvivo 12 Plus dilakukan melalui proses *coding* yang terbagi menjadi tiga tahapan yakni *open coding*, *selective coding*, *axial coding*. Pada

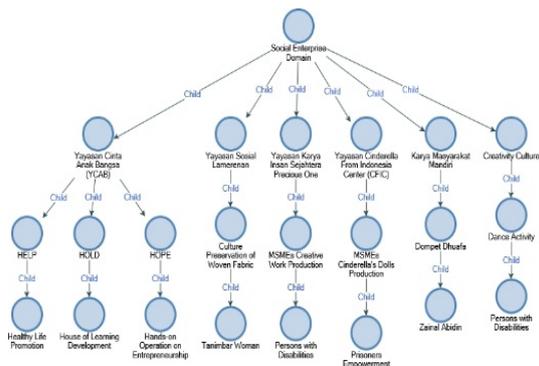
tahap *open coding*, data yang setiap elemen atau *node* dibentuk sesuai dengan data yang terhimpun. Selanjutnya, proses *selective coding* dilakukan untuk menyaring kembali entitas atau *node* yang relevan dengan konteks pembahasan atau ruang lingkup penelitian ini. Adapun, proses *axial coding* dilakukan untuk mempersempit pembahasan berdasarkan topik atau tujuan penelitian ini. Berdasarkan hasil *coding* dapat diperoleh gambaran tentang karakteristik program pemberdayaan masyarakat yang diakomodir oleh perusahaan sosial sesuai dengan kerangka penghidupan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Perusahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Penghidupan Berkelanjutan : Perspektif Penghidupan Berkelanjutan

Perusahaan sosial memiliki mekanisme yang berbeda dengan perusahaan profit. Bhattarai & Bhandari (2021) menunjukkan bahwa mekanisme operasional perusahaan sosial lebih memprioritaskan misi sosial, sementara perdagangan terbatas pada upaya untuk mencapai kemandirian finansial yang akan mendukung operasional organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan data hasil penelitian ini dapat diketahui ragam domain perusahaan sosial yang terejawantahkan dalam karakteristik program pemberdayaan masyarakat yakni pemberdayaan pada ranah ekonomi, pemberdayaan pada ranah pendidikan, pendampingan pertanian dan peternakan, hingga pemberdayaan pada ranah sosial-budaya.

Selanjutnya, *beneficiaries* dari program pemberdayaan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah inklusivitas bagi para penyandang disabilitas (anak-anak maupun dewasa), narapidana, dan perempuan seperti terlihat pada Gambar 2.

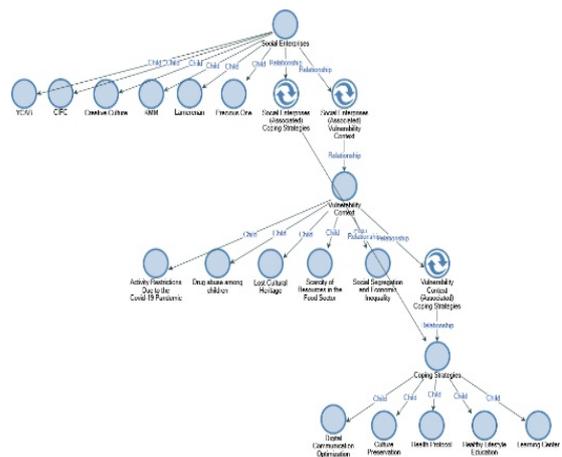


Gambar 2. Ragam Domain Perusahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Gambar 2 merupakan hasil identifikasi domain perusahaan sosial beserta *beneficiaries* dari program pemberdayaan komunitas. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan FGD bersama informan kunci, dapat diketahui bahwa Yayasan Karya Insan Sejahtera Precious One memberdayakan kaum disabilitas dalam menghasilkan karya kreatif sebagai produk unggulan yang akan memberikan keuntungan finansial. Selain itu, Creative Culture juga memberdayakan penyandang disabilitas dalam setiap performa tari-tarian, mengikat tali persaudaraan. Sementara itu, Yayasan Cinderella From Indonesia juga memberdayakan narapidana untuk memproduksi boneka dan dipasarkan secara global untuk mendukung penghidupan narapidana, sekaligus mengakumulasi modal finansial lembaga. Disamping itu, Yayasan Sosial Lamerenan juga memberdayakan para wanita dalam memproduksi kain tenun sebagai upaya melestarikan kebudayaan lokal. Adapun, Yayasan Cinta Anak Bangsa juga memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan dan ekonomi dengan memberikan pendampingan dan mobilitas akses terhadap modal finansial untuk berwirausaha. Lebih Jauh, Karya Masyarakat Mandiri melalui Dompot Dhuafa juga memberdayakan masyarakat di sektor

pertanian dalam upaya mengoptimalkan proses bisnis pertanian dan peternakan serta mengakumulasi modal finansial yang menguntungkan semua pihak.

Perusahaan sosial dalam program pemberdayaan masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah terkait dengan kebijakan publik yang berkenaan dengan hak akses terhadap informasi, penggunaan lahan operasional, hingga ijin penyelenggaraan kegiatan di berbagai lokasi. Choi dan Park (2021) menunjukkan bahwa pemerintah perlu menjadi katalisator dalam inisiasi kerjasama lintas sektoral. Kolaborasi yang saling menguntungkan diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan sosial. Dalam berbagai kasus, konflik kepentingan antar aktor dalam pembangunan rentan menghambat dan membatasi aktivitas perusahaan sosial, oleh sebab itu sinergitas kepentingan antar aktor dalam pembangunan di masing-masing daerah menjadi alternatif yang perlu disepakati bersama. Selain itu, kolaborasi yang saling menguntungkan diperlukan untuk mereduksi konteks kerentanan sebagai kondisi eksternal yang memengaruhi mekanisme serta struktur organisasi internal perusahaan sosial, sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Konteks Kerentanan yang Dihadapi Perusahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Gambar 3 merupakan gambaran mengenai konteks kerentanan yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan sosial beserta strategi koping. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konteks kerentanan yang teridentifikasi ialah keterbatasan aktivitas perusahaan sosial selama Pandemi Covid-19, maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, hilangnya warisan budaya, kelangkaan sumber daya pangan, serta segregasi sosial dan ketimpangan ekonomi. Sebagai strategi koping menghadapi pelbagai konteks kerentanan, perusahaan sosial berupaya untuk mengoptimalkan komunikasi dengan *beneficiaries* dengan memanfaatkan media digital, khususnya pada aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan seperti pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya, menerapkan protokol kesehatan sebagaimana kebijakan pemerintah di masing-masing daerah sebagai upaya untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pasien akibat pandemi Covid-19. Selain itu, peningkatan sosialisasi terkait dengan gaya hidup sehat dilakukan menggunakan pelbagai media komunikasi. Sebagai strategi koping menghadapi ancaman ketidakberlanjutan warisan budaya, maka preservasi budaya yang terejawatahkan dalam program pemberdayaan masyarakat juga dilakukan secara intensif.

Berdasarkan domain perusahaan sosial dapat diidentifikasi karakteristik sumber daya yang dimobilisir secara kelembagaan, sebagaimana karakteristik modal dalam kerangka penghidupan berkelanjutan. Singgalen (2021) menunjukkan bahwa karakteristik modal dalam kerangka penghidupan berkelanjutan ialah modal sosial, modal finansial, modal manusia, modal fisik, dan modal alam. Kapabilitas akses masyarakat terhadap salah satu bentuk modal dapat ditingkatkan melalui pelbagai program lembaga atau institusi penyelenggara program, sehingga terjadi diversifikasi hingga transformasi dari satu bentuk modal ke bentuk modal lainnya

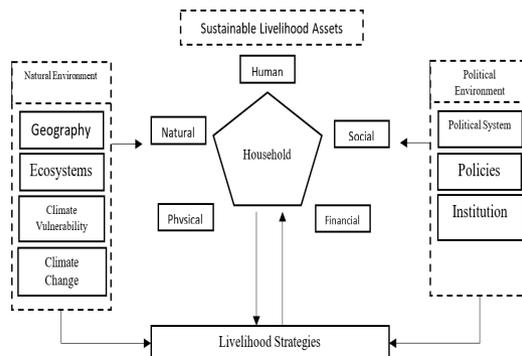
(Singgalen et al., 2019c). Singgalen et al. (2021) menunjukkan bahwa kerangka konseptual penghidupan berkelanjutan tidak hanya menekankan pada peran perusahaan atau suatu lembaga dalam memobilisir akses masyarakat terhadap beragam jenis aset, melainkan juga memetakan konteks kerentanan dan merencanakan strategi koping dalam bentuk program pemberdayaan yang mampu mempertahankan penghidupan *beneficiaries*. Meskipun demikian, Singgalen (2020b) konteks dinamika sosio-kultural, sosio-ekonomi, hingga sosio-ekologi perlu dipertimbangkan sebagai kerangka yang mencerminkan keunikan atau kontekstualitas dalam dinamika implementasi program pengabdian masyarakat oleh perusahaan sosial di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, proses akumulasi bentuk modal sosial dapat ditinjau berdasarkan struktur dan fungsi sosial masyarakat di wilayah perkotaan maupun perdesaan (Singgalen, 2020a). Sementara itu, proses akumulasi modal finansial dapat ditinjau berdasarkan karakteristik usaha yang dijalankan oleh masyarakat berdasarkan tingkatan bisnis baik Mikro, Kecil, atau Menengah (UMKM) (Singgalen et al., 2019c). Selanjutnya, proses akumulasi modal manusia perlu mempertimbangkan aksesibilitas terhadap informasi dan fasilitas pendidikan berdasarkan konteks ibukota (*main capital*) atau daerah terpencil/pinggiran (*remote/peripheral*) area (Singgalen et al., 2017). Selanjutnya, kapabilitas akses terhadap modal alam dalam hal ini sumber daya lahan yang dapat ditinjau dari perspektif sosio-kultural yang berhubungan dengan ritual, konservasi berbasis budaya, warisan, alih fungsi lahan, dan pengakuan atas pertukaran lahan yang sah secara budaya (Singgalen et al., 2019b). Demikian halnya, kapabilitas akses terhadap modal fisik yang dapat ditinjau dari relasi masyarakat dengan pemerintah di setiap program pembangunan infrastruktur di

masing-masing daerah melalui kebijakan hingga lembaga yang kredibel (Singgalen et al., 2019a). Berdasarkan ragam konteks akses masyarakat terhadap bentuk modal pendukung keberlanjutan penghidupan, konteks perusahaan sosial YCAB, KMM, Precious One, Lamerenan, CIFC, Creative Culture menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat telah meningkatkan kapabilitas akses masyarakat terhadap seluruh bentuk modal dalam kerangka penghidupan berkelanjutan yaitu modal manusia, modal sosial, dan modal finansial, modal fisik, dan modal alam. Hal tersebut dapat ditinjau dari domain perusahaan sosial yang bergerak di bidang pendidikan (modal manusia) serta perluasan akses terhadap fasilitas belajar (modal fisik), perlindungan warisan budaya melalui aktivitas tari hingga menenun (modal sosial), menjual karya kreatif penyandang disabilitas maupun narapidana (modal finansial) serta pendampingan *beneficiaries* di bidang pertanian (modal alam).

Intensifikasi salah satu bentuk modal dapat mendorong diversifikasi dan transformasi bentuk modal dari modal sosial ke modal finansial, sebagaimana studi kasus Creative Culture yang memperluas jejaring sosial dan kekerabatan untuk menampilkan tari-tarian secara terorganisir sehingga memperoleh keuntungan finansial setiap kali menampilkan tari-tarian di berbagai kegiatan. Selain itu, terjadi diversifikasi bentuk modal manusia menjadi modal finansial, sebagaimana studi kasus YCAB yang telah melakukan pendampingan dan pelatihan informal kepada *beneficiaries* tentang kewirausahaan sesuai bidang bisnis yang diminati, kemudian memberikan stimulus berupa dana memulai usaha. Hal ini menunjukkan peran serta kontribusi perusahaan sosial dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk mengakses berbagai bentuk sumber daya (modal) agar mencapai penghidupan yang berkelanjutan. Secara teoretis, dalam kerangka penghidupan berkelanjutan, transformasi struktur dan proses perusahaan sosial dapat

memobilisir akses terhadap sumber daya serta mereduksi konteks kerentanan agar dapat mewujudkan penghidupan yang berkelanjutan, sebagaimana Gambar 4.



Gambar 3. Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (*DFID 's Sustainable Livelihoods Approach and Its Framework, 2008*)

Gambar 4 merupakan kerangka kerja pendekatan penghidupan berkelanjutan yang relevan dengan konteks penelitian tentang kontribusi perusahaan sosial melalui program pemberdayaan komunitas untuk mewujudkan ketahanan penghidupan atau keberlanjutan penghidupan di berbagai konteks wilayah. Kerangka tersebut menggambarkan hubungan antara konteks kerentanan, transformasi struktur dan proses, serta mobilitas untuk mengakses modal. Secara spesifik, dapat diketahui bahwa mekanisme pembentukan struktur penghidupan yang berkelanjutan bersifat kontekstual. Dalam konteks Indonesia, konteks kerentanan yang mengancam keberlangsungan penghidupan masyarakat dapat berupa popularitas (*trend*), guncangan (*shock*), budaya (*culture*) hingga lingkungan (*ecology*). Konteks kerentanan yang tidak diatasi berimplikasi terhadap keterbatasan akses terhadap sumber daya.

Secara empiris, peran perusahaan sosial melalui pemberdayaan masyarakat untuk mendukung penghidupan yang berkelanjutan ditandai dengan program-

program yang meningkatkan kapabilitas akses terhadap erhadap modal manusia, modal alam, modal fisik, modal finansial dan modal sosial telah diakomodir dalam visi dan misi perusahaan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sosial telah berperan sebagai mobilisator penghidupan masyarakat yang berkelanjutan, untuk menghadapi berbagai macam konteks kerentanan seperti popularitas (*trend*), guncangan (*shock*), budaya (*culture*) hingga lingkungan (*ecology*) sesuai konteks Indonesia. Dalam konteks kerangka penghidupan berkelanjutan, legitimasi dan dukungan kebijakan terhadap perusahaan sosial perlu dioptimalkan melalui integrasi kepentingan pemerintah dan swasta agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa domain perusahaan sosial dalam penelitian ini memiliki fokus pada ranah ekonomi, pendidikan, pertanian dan peternakan, serta sosial dan budaya. Kontribusi utama perusahaan sosial bagi masyarakat atau komunitas di wilayah operasi ialah optimalisasi mobilitas akses terhadap sumber daya dalam bentuk modal manusia, modal finansial, modal sosial, modal fisik, modal alam untuk mereduksi pelbagai konteks kerentanan. konteks kerentanan yang teridentifikasi ialah keterbatasan aktivitas perusahaan sosial selama Pandemi Covid-19, maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak, hilangnya warisan budaya, kelangkaan sumber daya pangan, serta segregasi sosial dan ketimpangan ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini telah memetakan domain utama dari perusahaan sosial, konteks kerentanan yang dihadapi, serta bentuk modal dalam kerangka penghidupan berkelanjutan yang telah dimobilisir. Secara praksis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pemantik para pemangku kepentingan untuk bersinergi dengan perusahaan sosial dalam menghadapi

berbagai konteks kerentanan yang mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat di masing-masing daerah. Dengan demikian, diperlukan sinergitas antara perusahaan sosial dan pemerintah untuk bersama mewujudkan penghidupan komunitas yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan LLDIKTI Wilayah 3 atas dukungan dalam penelitian dan publikasi. Demikian halnya ucapan terima kasih disampaikan kepada para kolega yaitu Ibu Rosdiana Sijabat, Ibu Pristiana Widyastuti, dan Ibu Agnes Harnadi. Terima kasih atas seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk terlibat di dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Kewirausahaan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhattarai, C., & Bhandari, M. (2021). "Trade vs . grant dependency " and social enterprise performance : A mediating role of learning orientation ABSTRACT. *Journal of the International Council for Small Business*, 00(00), 1–7. <https://doi.org/10.1080/26437015.2021.1944791>
- Choi, D., & Park, J. (2021). Local government as a catalyst for promoting social enterprise. *Public Management Review*, 23(5), 665–686. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1865436>
- Crawford-Spencer, E., & Cantatore, F. (2016). Models of Franchising for Social Enterprise. *Journal of Marketing Channels*, 23(1–2), 47–59. <https://doi.org/10.1080/1046669X.2016.1147891>
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53,

- Issue 9).
file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (2018).pdf%0Afile:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cres Davies, I. A., Haugh, H., & Chambers, L. (2019). Barriers to Social Enterprise Growth. *Journal of Small Business Management*, 57(4), 1616–1636. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12429>
- DFID 's Sustainable Livelihoods Approach and its Framework. (2008).
- Doherty, B., & Kittipanya-Ngam, P. (2021). The emergence and contested growth of social enterprise in Thailand. *Journal of Asian Public Policy*, 14(2), 251–271. <https://doi.org/10.1080/17516234.2020.1777628>
- Fifiyanti, D., & Damanik, J. (2021). Pemetaan Peran Dan Kontribusi Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Ekowisata Desa Burai. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 448–462. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.36893>
- Gray, M., Healy, K., & Crofts, P. (2003). Social enterprise: Is it the business of social work? *Australian Social Work*, 56(2), 141–154. <https://doi.org/10.1046/j.0312-407X.2003.00060.x>
- Gupta, P., & Srivastava, R. (2021). Research on Social Enterprises from an Emerging Economy—Systematic Literature Review and Future Research Directions. *Journal of Social Entrepreneurship*, 0(0), 1–36. <https://doi.org/10.1080/19420676.2021.1974926>
- Idris, A., & Hijrah Hati, R. (2013). Social Entrepreneurship in Indonesia: Lessons from the Past. *Journal of Social Entrepreneurship*, 4(3), 277–301. <https://doi.org/10.1080/19420676.2013.820778>
- Jenner, P., & Oprescu, F. (2016). The Sectorial Trust of Social Enterprise: Friend or Foe? *Journal of Social Entrepreneurship*, 7(2), 236–261. <https://doi.org/10.1080/19420676.2016.1158732>
- Levander, U. (2010). Social Enterprise: Implications of emerging institutionalized constructions. *Journal of Social Entrepreneurship*, 1(2), 213–230. <https://doi.org/10.1080/19420676.2010.511815>
- Linton, K. F. (2013). Developing a Social Enterprise as a Social Worker. *Administration in Social Work*, 37(5), 458–470. <https://doi.org/10.1080/03643107.2013.828000>
- Mardana, I. B. P. (2014). Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dengan the Sustainable Livelihood Approach Berbasis Budaya Lokal Di Daerah Lahan Kering Nusa Penida Klungkung-Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 371–379. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i1.2927>
- Margiono, A., Kariza, A., & Heriyati, P. (2019). Venture legitimacy and storytelling in social enterprises. *Small Enterprise Research*, 26(1), 55–77. <https://doi.org/10.1080/13215906.2019.1570318>
- Mdee, A., Lyne, I., & Cornelius, N. (2008). Social enterprise: governance, impact and measurement. *Education, Knowledge and Economy*, 2(3), 149–153. <https://doi.org/10.1080/17496890802426030>
- Mohiuddin, M. F. (2017). Islamic social enterprises in Bangladesh: Conceptual and institutional challenges. *Cogent Business and Management*, 4(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1351197>

- 7.1305674
- Mudana, I. W. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 598–608. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6381>
- Puspadewi, I., Soetjipto, B. W., Wahyuni, S., & Wijayanto, S. H. (2019). Managing Paradox for the Sustainability of Social Enterprises: An Empirical Study of Forestry Community Cooperatives in Indonesia. *Journal of Social Entrepreneurship*, 10(2), 177–192. <https://doi.org/10.1080/19420676.2018.1541008>
- Sacchetti, S., Borzaga, C., & Tortia, E. C. (2021). The Institutions of Livelihood and Social Enterprise Systems. *Forum for Social Economics*, 0(0), 1–16. <https://doi.org/10.1080/07360932.2021.1927792>
- Scarlato, M. (2012). Social Enterprise and Development Policy: Evidence from Italy. *Journal of Social Entrepreneurship*, 3(1), 24–49. <https://doi.org/10.1080/19420676.2012.659675>
- Singgalen, Y. A. (2020a). Intensification of Social Capital through Ritual Capital. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 08(01), 82–104. <https://doi.org/10.22500/8202029421>
- Singgalen, Y. A. (2020b). Moyooka : Socio-Cultural Value of Halmahera Woman in Rural Household Livelihood. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(3), 179–193. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/8202031163>
- Singgalen, Y. A. (2021). Covid-19, Trust, and Vulnerability In North Halmahera District of Indonesia Covid-19. *Jurnal Aristo*, 9(2), 351–374. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2598>
- Singgalen, Y. A., Kusumawicitra, A., & Brito, M. (2021). Gender, Livelihood, and Ecotourism during Covid-19 Epidemic in North Halmahera of Indonesia. *Jurnal Kajian Gender*, 13(1), 1–20. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v13i1.3475>
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, G. P. (2017). Institutional Analysis of Community-Based Tourism's Sustainability (Case of Kasbi Community in North Halmahera). *Sodality*, 6(3), 198–200.
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019a). Community Participation in Festival and Digital Tourism Campaign (Case of North Halmahera District, Indonesia). *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 7(1), 21–31. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2019.007.01.04>
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019b). Ritual capital for rural livelihood and sustainable tourism development in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 25(2), 115–125. <https://doi.org/10.7226/jtfm.25.2.115>
- Singgalen, Y. A., Sasongko, G., & Wiloso, P. G. (2019c). Social Capital and Livelihood Diversification : Tourism Entrepreneurship in a Remote Area of North Halmahera, Indonesia. *KAWISTARA*, 9(3), 285–298.
- Sofian, A., Yanti, N., & Illiyyun, N. N. (2021). Dinamika Kehidupan Ekonomi Petani Garam di Desa Dresi Kulon. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 351–367. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.34211>
- Teasdale, S. (2010). How can social enterprise address disadvantage? Evidence from an inner city community. *Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing*, 22(2), 89–107. <https://doi.org/10.1080/10495141003601278>
- Telagawathi, N. L. S. (2017). Pemberdayaan

Usaha Kecil dan Menengah Kain
Tenun Cepuk di Kecamatan Nusa
Penida Kabupaten Klungkung, Bali.
Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora,
6(1), 1–9.

Wayan, S. P., & Sutajaya, I. M. (2016).
Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Pelatihan Ergo-Entrepreneurship
Untuk Mengembangkan Pengetahuan
Dan Sikap Kewirausahaan Serta
Meningkatkan Pendapatan Pedagang
Kuliner Lokal Di Desa Peliatan, Ubud,
Gianyar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan
Humaniora*, 4(2), 609–622.
<https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v4i2.6382>